KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR berpotensi rugikan negara Rp 945 Miliar
Tanggal : Jumat, 13 Mei 2016
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

DPR Berpotensi Rugikan Negara Rp945 Miliar

BPK Temukan Kunjungan Kerja Fiktif Anggota Dewan

JAKARTA – Kunjungan kerja (kunker) sejumlah anggota DPR ke daerah pemilihan diduga fiktif sehingga berpotensi merugikan negara hingga Rp945.465.000.000. Potensi kerugian negara ini diketahui berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Informasi perihal kunker fiktif ini mencuat kemarin setelah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR menyurati anggotanya untuk meminta membuat laporan hasil kunker secara lengkap. Kewajiban membuat laporan kunker diklaim untuk merespons permintaan Kesekretariatan Jenderal (Setjen) DPR.

Ketua BPK Harry Azhar Azis membenarkan dugaan kerugian negara tersebut berdasarkan hasil audit tahunan dan uji petik (sampling) di DPR. Menurutnya, banyak di antara laporan hasil kunker anggota DPR tidak dapat dibuktikan kebenarannya. "Itu masuk dalam bagian audit yang sedang kita kerjakan, kita audit dari 1 Januari sampai 31 Desember 2015," ujar Harry kepada *KORAN SINDO* di Jakarta, kemarin.

Harry menjelaskan, audit kunker itu merupakan bagian dari audit tahunan lembaga DPR, termasuk juga audit keuangan DPR yang hasilnya akan diserahkan ke DPR pada Juni 2016. Namun, mengenai jumlah pasti potensi kerugian negara, Harry mengaku tidak tahu. "Saya enggak tahu angkanya berapa, karena itu sedang diaudit," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno membenarkan bahwa fraksinya pada 10 Mei 2016 menyurati seluruh anggotanya untuk membuat laporan lengkap mengenai hasil kunker. Hal itu didasarkan atas ketentuan Peraturan Nomor 1/2014 tentang Tata Tertib (Tatib) DPR Pasal 211 ayat 6 sekaligus merespons Surat Setjen DPR tentang diragukannya keterjadian kunker perorangan anggota DPR dalam melaksanakan tugas.

Laporan lengkap diperlukan karena apa yang selama ini dibuat oleh anggota DPR sebagian tidak memadai dari sisi akuntabilitas. "Kadang-kadang ada foto (kegiatan kunker) yang sama digunakan berkali-kali, kemudian staf yang sama. Menurut BPK, akuntabilitasnya itu tidak memadai," ujarnya kemarin.

> ***"Itu masuk dalam bagian audit yang sedang kita kerjakan, kita audit dari 1 Januari sampai 31 Desember 2015."***
>
> **HARRY AZHAR AZIS**
> Ketua BPK

Namun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Winantuningtyastiti Swasanani membantah pernah membuat surat kepada fraksi-fraksi, termasuk PDIP, yang isinya mengenai kunker fiktif oleh anggota DPR berdasarkan hasil audit BPK. "Saya tidak pernah mengeluarkan surat itu," ujarnya.

Hingga kemarin, belum semua fraksi di DPR menerima pemberitahuan dari Setjen DPR perihal hasil audit BPK tersebut. Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan, jika benar BPK memiliki temuan kerugian negara akibat kunker fiktif, dia menilai perlu segera ada perhatian khusus. Harus segera ada klarifikasi dari pimpinan DPR perihal hasil audit BPK tersebut. Selain itu, perlu ada penjelasan di mana letak sebenarnya sehingga itu dikatakan fiktif.

Dia mengaku sejak awal periode DPR ini sudah mengingatkan anggota fraksinya agar benar-benar berkunjung ke dapil saat reses membuat program kegiatan di sana. "Di awal periode DPR ini, saya sudah mengingatkan anggota Fraksi PAN bahwa kalau reses harus ke dapil," ujarnya kemarin.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan, potensi kerugian negara itu disebabkan oleh beberapa modus yang dilakukan oknum anggota DPR. Mereka tidak melaporkan hasil kunker baik itu laporan keuangan maupun laporan kegiatan.

Tidak dilaporkannya hasil kunker tersebut, kata dia, membuktikan beberapa hal, yakni *pertama*, anggota DPR tidak berkomitmen dalam membuat laporan kunker sehingga menguatkan kesan bahwa kegiatan itu hanya pelesiran semata. *Kedua*, ada kelemahan di internal DPR dalam hal transparansi dan akuntabilitas. "Seharusnya Sekjen bisa memaksa anggota DPR, melalui fraksi atau komisi untuk membuat laporan. Kelemahan ini juga tanggung jawab Sekjen DPR," kata Yenny.

Ketiga, dari fakta ini terlihat fraksi secara politik kurang berkomitmen untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas.

Fitra lantas mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut untuk diproses hukum.

● **kiswondari**